

BAB II

PERENCANAAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN

II.1. Pengertian KJA

Pada dasarnya KJA dan KAP adalah sama, baik didalam penyusunan dan pembuatan perencanaan audit, maupun dalam melaksanakan proses dan prosedur audit. Pedoman yang digunakan KJA dalam menjalankan aktivitasnya pun sama dengan KAP, yaitu SPAP. Yang membedakan antara KJA dengan KAP adalah bentuk usahanya saja.

Menurut SK. Menkeu No. 43/1997, bentuk usaha KAP yang dikenal menurut hukum di Indonesia ada dua macam, yaitu: KAP dalam bentuk usaha sendiri dan KAP dalam bentuk usaha kerjasama. Penanggungjawab KAP usaha sendiri adalah akuntan publik yang bersangkutan, sedangkan penanggungjawab KAP usaha kerjasama adalah dua orang atau lebih akuntan publik yang masing-masing merupakan rekan atau partner dari salah seorang bertindak sebagai rekan pimpinan, berbeda halnya dengan KJA. KJA dimiliki oleh koperasi, sehingga penanggungjawab KJA adalah rapat anggota.

KJA adalah koperasi-koperasi yang bergabung, membentuk koperasi baru untuk memberikan jasa di bidang auditing. Tujuan KJA didirikan dalam rangka untuk menyebarluaskan pengetahuan dan akuntansi di kalangan UKMK yang mengalami kesulitan didalam menyusun laporan keuangan. Alasan KJA didirikan karena UKMK mendapat bantuan dari Bank Dunia untuk mengembangkan usahanya. Tetapi sebagai persyaratan dari pihak sponsor UKMK diwajibkan untuk

diaudit laporan keuangannya oleh auditor independen. Koperasi tidak mampu membayar jasa audit laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP, oleh karena itu koperasi-koperasi yang mendapatkan bantuan dari Bank Dunia berinisiatif untuk mendirikan KJA, supaya audit tetap berjalan dengan semestinya dan biaya yang harus dikeluarkan dapat dijangkau.

Pada mulanya, klien KJA hanyalah usaha kecil, menengah, dan koperasi, karena KJA didirikan oleh perkumpulan koperasi. Namun seiring dengan semakin berkembangnya zaman, klien KJA tidaklah hanya terbatas pada koperasi saja, tetapi sudah merambah ke non koperasi.

II.2. Pengertian dan Tujuan Audit Laporan Keuangan

II.2.1. Pengertian Audit

Audit dapat didefinisikan sebagai berikut:¹¹

Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

II.2.2. Tujuan Audit

Tujuan audit laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu:¹²

a. Tujuan umum

Tujuan audit secara umum adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien telah menyatakan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk

¹¹ Mulyadi, *loc cit*, hal. 9.

¹² W.C. Boynton, R. N. Johnson, W. G. Kell, *Modern Auditing*, Seventh Edition, Paul A. Rajoe, Gina Gania, Ichsan Setiyo Budi, Erlangga, Jakarta, 2003, hal. 195.

mencapai tujuan tersebut, hal yang biasanya dilakukan dalam audit adalah mengidentifikasi sejumlah tujuan khusus audit bagi setiap akun yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

b. Tujuan khusus

Tujuan audit secara khusus ini diambil dari asersi yang dibuat oleh manajemen dan dimuat dalam laporan keuangan. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan besar berikut ini:¹³

1. Keberadaan atau keterjadian (*existence or occurrence*).
2. Kelengkapan (*completeness*).
3. Hak dan kewajiban (*right and obligation*).
4. Penilaian atau alokasi (*valuation or allocation*).
5. Penyajian dan pengungkapan (*presentation and disclosure*).

II.3. Perencanaan Audit Laporan Keuangan

Dalam pelaksanaan proses audit, audit dibagi menjadi empat tahapan kegiatan penting. Salah satu tahapan kegiatan penting dalam audit laporan keuangan adalah perencanaan. Ruchjat Kosasih menyatakan arti perencanaan sebagai berikut: “Perencanaan adalah proses terpadu untuk menentukan sifat, jenis, besar serta lamanya kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi

¹³ Ikatan Akuntan Publik, *loc cit*, SA Seksi 326, p: 03.

dalam suatu jangka waktu yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu."¹⁴

Oleh karena itu, perencanaan audit mengandung arti bahwa perlu penyusunan suatu kerangka kerja yang menyeluruh tentang pelaksanaan yang akan dilakukan, waktu, luas, tempat, tujuan, personal, dan sifat dari audit yang dilakukan.

Perencanaan audit adalah suatu tahapan yang terperinci, yang menyangkut prosedur dan rencana auditor yang akan digunakan dalam pelaksanaan suatu audit. Dalam mengaudit laporan keuangan, auditor harus benar-benar merencanakan audit agar audit berjalan efektif dan efisien. Perencanaan audit yang memadai, tercantum dalam standar pekerjaan lapangan pertama pada standar auditing seksi 311 tentang perencanaan dan supervisi, yang mengharuskan bahwa "*Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.*"¹⁵

II.4. Tahap-Tahap Perencanaan Audit Laporan Keuangan

Setelah auditor memutuskan untuk menerima perikatan audit dari kliennya, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah merencanakan audit. Untuk membantu dalam mempelajari perencanaan audit laporan keuangan, maka penulis membuat tabel 2.1. yang menunjukkan perbandingan tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan. Tabel perbandingan ini dibuat dengan maksud untuk saling melengkapi, karena ada tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan yang tidak dijelaskan secara terinci antara buku yang satu dengan buku yang lainnya. Dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan tahap-tahap

¹⁴ Akuntansi, No. 27 Oktober 1986.

¹⁵ Ikatan Akuntan Publik, *op cit*, SA Seksi 311, p: 01.

perencanaan audit laporan keuangan menurut Arens dan Loebbecke yang ditulis didalam bukunya yang berjudul *auditing an integrated approach*, menurut Boynton, Johnson dan Kell yang ditulis didalam bukunya yang berjudul *modern auditing*, dan menurut IAI yang ditetapkan dalam SPAP. Buku karangan Arens dan Loebbecke (2000) dan Boynton, Johnson dan Kell (2003) ini dipilih karena banyak penulis buku *auditing* di Indonesia yang menyadur hasil pemikiran dari buku-buku yang ditulis oleh mereka, sedangkan SPAP merupakan ketetapan yang berlaku di Indonesia yang harus diikuti oleh semua auditor independen di Indonesia dan menjadi acuan bagi auditor independen dalam melaksanakan audit.

Tabel 2.1.
Perbandingan Tahap-Tahap Perencanaan Audit Laporan Keuangan

Auditing an Integrated Approach ¹⁶	Modern Auditing ¹⁷	SPAP ¹⁸
1. Memperoleh informasi mengenai latar belakang entitas 2. Memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien.	1. Memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien.	1. Memperoleh informasi mengenai masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat usaha entitas tersebut. (SA 318) 2. Memperoleh informasi mengenai kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut. (SA 318) 3. Metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. (SA 311, p. 09, SA 324)
3. Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan.	2. Melaksanakan prosedur analitis.	4. Melaksanakan prosedur analitis. (SA 329)

¹⁶ A. A. Arens, J. K. Loebbecke, *Auditing Pendekatan Terpadu*, Buku Satu, Amir Abadi Jusuf, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hal. 189.

¹⁷ W.C. Boynton, R. N. Johnson, W. G. Kell, *op cit*, hal 285

¹⁸ Ikatan Akuntan Publik, *op cit*, SA Seksi 311, p. 03.

Tabel 2.1.
Perbandingan Tahap-Tahap Perencanaan Audit Laporan Keuangan (Lanjutan)

Auditing an Integrated Approach	Modern Auditing	SPAP
<p>4. Menentukan materialitas dan menetapkan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan</p>	<p>3. Membuat pertimbangan awal tentang tingkat materialitas. 4. Mempertimbangkan risiko audit. 5. Mengembangkan strategi audit awal untuk asersi signifikan.</p>	<p>5. Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. (SA 312) 6. Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau perubahan pengujian audit, seperti risiko kekeliruan atau kecurangan yang material atau adanya transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. (SA 316, SA 334)</p>
<p>5. Memahami struktur pengendalian intern dan menetapkan risiko pengendalian.</p>	<p>6. Memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern klien.</p>	<p>7. Memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien. (SA 319) 8. Menetapkan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. (SA 312, SA 319)</p>
<p>6. Mengembangkan rencana audit dan program audit menyeluruh.</p>		<p>9. Membuat kertas kerja. (SA 339) Kertas kerja perencanaan audit terdiri dari <i>audit plan memorandum</i> dan audit program. 10. Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian (<i>adjustment</i>). (SA 311, p: 03)</p>

Tabel 2.1.
Perbandingan Tahap-Tahap Perencanaan Audit Laporan Keuangan (Lanjutan)

Auditing an Integrated Approach	Modern Auditing	SPAP
		<p>11. Sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan (sebagai contoh, laporan auditor tentang laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan yang diserahkan ke Bapepam, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak perjanjian). (SA 311, p: 03)</p>

Setelah membandingkan tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan yang dirumuskan oleh Arens dan Loebbecke (2000), Boynton, Johnson, Kell (2003) dan IAI (2001), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan yang dirumuskan mereka adalah sama. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan yang ditetapkan oleh IAI dalam SPAP, karena penulis melakukan penelitian di Indonesia, maka penulis harus mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Tabel 2.2.
Tahap-Tahap Perencanaan Audit Laporan Keuangan Menurut SPAP

Perencanaan Audit Laporan Keuangan	Klien
<p>1. Memperoleh informasi mengenai masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat usaha entitas tersebut, termasuk: (SA 318)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Struktur organisasi entitas, personel-personel kunci dan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. b. Kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut. c. Metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. d. Peraturan lain, seperti: peraturan pemerintah, perpajakan, dll. 	
<p>2. Melaksanakan prosedur analitis. (SA 329)</p>	

Tabel 2.2.
Tahap-Tahap Perencanaan Audit Laporan Keuangan Menurut SPAP (Lanjutan)

Perencanaan Audit Laporan Keuangan	Klien
3. Mempertimbangkan materialitas dan risiko audit, termasuk juga mempertimbangkan materialitas dan risiko audit yang disebabkan oleh kekeliruan dan kecurangan. (SA 312)	
4. Memperoleh pemahaman atas struktur pengendalian intern entitas. (SA 319)	
5. Membuat kertas kerja. (SA 339) Kertas kerja perencanaan audit terdiri dari <i>audit plan memorandum</i> dan audit program.	
6. Sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan (sebagai contoh, laporan auditor tentang laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan yang diserahkan ke Bapepam, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak perjanjian). (SA 311, p: 03)	

II.5. Pengujian Kepatuhan Perencanaan Audit Laporan Keuangan

II.5.1. Audit Sampling

Dalam SPAP, audit sampling didefinisikan sebagai penerapan prosedur audit terhadap kurang dari seratus persen unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut.¹⁹ Pada penelitian ini, penulis

¹⁹ Ikatan Akuntan Publik, *op cit*, SA Seksi 350, p: 01.

menggunakan audit sampling untuk pengujian kepatuhan. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah populasi yang akan diteliti.

Audit sampling dibagi menjadi dua, yaitu statistik sampling dan non statistik sampling. Perbedaan utama kedua jenis sampling tersebut adalah bahwa statistik sampling menggunakan hukum probabilitas, sedangkan dalam nonstatistik sampling kita dapat menentukan ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel sepenuhnya berdasarkan kriteria subyektif serta pengalamannya. Dalam statistik sampling mungkin diperlukan biaya tambahan untuk melatih auditor dalam penggunaan statistik dan merancang serta menerapkan rencana sampling. Namun demikian, statistik sampling akan bermanfaat bagi auditor dalam merancang sampel yang efisien, mengukur kecukupan bukti yang diperoleh, dan menilai hasil sampel. Selain itu yang paling penting adalah bahwa statistik sampling memungkinkan auditor untuk mengkuantifikasi dan mengendalikan risiko sampling.²⁰

II.5.2. Model-Model Attribute Sampling

Statistik sampling dibagi menjadi dua, yaitu *attribute sampling* dan *variable sampling*. *Attribute sampling* digunakan pada pengujian pengendalian dan bertujuan untuk menaksir tingkat deviasi dari pengendalian yang telah ditetapkan dalam suatu populasi, sedangkan *variable sampling* digunakan pada pengujian substantif dan bertujuan untuk menaksir jumlah total rupiah suatu

²⁰ Al. Haryono Jusup, *loc cit*, hal. 397.

populasi atau jumlah rupiah kekeliruan dalam suatu populasi. *Attribute sampling* terdiri dari tiga model.²¹

a. *Fixed sample size attribute sampling*

Pengambilan sampel dengan model ini ditujukan untuk memperkirakan persentase terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi. Model ini terutama digunakan jika auditor melakukan pengujian pengendalian terhadap suatu unsur pengendalian intern, dan auditor tersebut memperkirakan akan menjumpai beberapa penyimpangan (kesalahan).

b. *Stop or go sampling*

Model pengambilan sampel ini sering juga disebut dengan *decision attribute sampling*. Model ini digunakan jika auditor yakin bahwa kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat kecil.

c. *Discovery sampling*

Model pengambilan sampel ini cocok digunakan jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah (mendekati nol). Model ini dipakai oleh auditor untuk menemukan kecurangan, pelanggaran yang serius dari unsur pengendalian intern, dan ketidakberesan yang lain.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan model *fixed sample size attribute sampling*. Hal ini dikarenakan penulis memperkirakan akan menjumpai beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan perencanaan audit laporan keuangan KJA Nur'aini DIY, yang disebabkan oleh perbandingan jumlah klien KJA Nur'aini DIY lebih besar daripada jumlah staf auditor tetapnya. Langkah-langkah

²¹ Mulyadi, *op cit*, hal. 253-254.

yang digunakan dalam model *fixed sample size attribute sampling* tersebut adalah:²²

1. Menentukan *attribute* yang akan diperiksa untuk menguji kepatuhan pelaksanaan perencanaan audit laporan keuangan.

Attribute adalah karakteristik yang bersifat kualitatif suatu unsur yang membedakan unsur tersebut dengan unsur yang lain. Dalam hubungannya dengan perencanaan audit laporan keuangan, *attribute* adalah penyimpangan dari ada atau tidaknya unsur tertentu dalam suatu perencanaan audit laporan keuangan yang seharusnya ada. *Attribute* yang akan diperiksa adalah:

1. Pengisian nomor badan hukum koperasi
2. Pengisian susunan pengurus, pengawas, karyawan untuk periode tertentu.
3. Pengisian besarnya simpanan pokok, wajib, dan sukarela.
4. Pengisian kebijakan pembagian SHU.
5. Pengisian jumlah anggota.
6. Pengisian unit-unit usaha yang ada.
7. Pengisian perbandingan neraca komparatif.
8. Pengisian perbandingan rugi laba komparatif.
9. Pengisian buku/catatan akuntansi/pembukuan yang digunakan.
10. Pengisian metode pembukuan.
11. Pengisian kebijakan akuntansi.

²² Mulyadi, *op cit*, hal. 254-260.

12. Pengisian pembuatan laporan keuangan.

13. Pengisian komentar auditor atas pembukuan secara umum dan hal-hal yang harus lebih diperhatikan pada saat pelaksanaan audit.

14. Pengisian kondisi lingkungan yang mempengaruhi klien.

15. Pengisian rencana kerja.

2. Menentukan populasi yang akan diambil sampelnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah *audit plan memorandum*.

3. Menentukan besarnya sampel.

Dalam pengujian kepatuhan terhadap perencanaan audit laporan keuangan KJA Nur'aini DIY, penulis menetapkan tingkat keandalan (*reliability level*) sebesar 95% ($R\%=95\%$), taksiran persentase kesalahan dalam populasi (*rate of occurrence*) sebesar 1%, dan batas ketepatan atas yang diinginkan (*desired upper precission limit* atau DUPL) sebesar 10%, maka *audit plan memorandum* yang digunakan sebagai sampel sebanyak 50 buah.

4. Memilih anggota sampel dari seluruh anggota populasi.

Pemilihan anggota sampel menggunakan tabel angka acak.

5. Pemeriksaan terhadap *attribute* yang menunjukkan kesesuaian unsur perencanaan audit laporan keuangan.

Setelah 50 buah *audit plan memorandum* yang dijadikan sampel diambil, langkah berikutnya adalah memeriksa *attribute* yang telah ditentukan.

6. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap anggota sampel.

Pada tahap ini, akan ditentukan apakah *achieved upper precision limit* (AUPL) yang didapat lebih besar atau kurang dari DUPL yang telah ditetapkan. Jika AUPL kurang dari DUPL, maka perencanaan audit laporan keuangan KJA Nur'aini DIY telah sesuai, demikian pula sebaliknya.

